

PAPER AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH

Dosen Pengampu:

Dr. Pujiati, S.Pd., M.Pd.

Dr. Fitra darma, S.E., M.Si.

Galuh Sandi, S.Pd., M.Pd.

KELOMPOK 10

Az Zahra Syahlia Putri 2413031041

Adzra Ati'iqah 2413031056

Arshella Cahya Yuniarti 2413031058

AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN, IMBALAN KERJA, AKUNTANSI SEWA, KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI DAN KESALAHAN, LAPORAN ARUS KAS

I. PENDAHULUAN

Laporan keuangan merupakan alat penting bagi perusahaan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, serta arus kas secara transparan dan akurat. Untuk mencapai kualitas informasi tersebut, perusahaan harus menerapkan berbagai standar akuntansi yang mencakup beragam aspek, seperti akuntansi pajak penghasilan, imbalan kerja, sewa, kebijakan akuntansi, serta penyusunan laporan arus kas. Setiap topik memiliki peran penting dalam memastikan bahwa laporan keuangan tidak hanya sesuai standar, tetapi juga mampu memberikan gambaran yang andal bagi para pemangku kepentingan. Dengan pemahaman yang baik terhadap konsep-konsep ini, perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih tepat serta memenuhi kewajiban pelaporan secara profesional.

II. TINJAUAN TEORI

1. Akuntansi Pajak Penghasilan

Akuntansi pajak penghasilan membahas cara perusahaan menghitung, menyajikan, dan mengungkapkan informasi terkait pajak penghasilan dalam laporan

keuangan. Informasi tersebut dicantumkan sebagai beban pajak pada laporan laba rugi. Pengakuan beban pajak akan menimbulkan aset atau liabilitas pada laporan posisi keuangan. Beban pajak yang timbul dapat berupa beban pajak kini maupun beban pajak tangguhan (Martani et al., 2019).

2. Imbalan Kerja

Imbalan kerja adalah seluruh bentuk kompensasi yang diberikan perusahaan kepada karyawan sebagai balasan atas jasa atau pekerjaan yang telah mereka lakukan. Imbalan ini tidak hanya berupa gaji atau upah, tetapi juga mencakup berbagai manfaat lain yang diterima karyawan, baik selama masih bekerja maupun setelah berhenti bekerja. Imbalan kerja meliputi: Imbalan kerja jangka pendek, pesangon, imbalan pasca kerja, dan imbalan kerja jangka panjang lainnya.

3. Definisi Sewa

Sewa adalah perjanjian antar lessee (penyewa) dengan lessor (pembeli sewa) di mana penyewa diberikan hak oleh pemberi sewa untuk menggunakan aset milik pemberi sewa pada periode yang telah disepakati. Atas diperolehnya hak tersebut penyewa diharuskan melakukan pembayaran kepada pemberi sewa. Perjanjian sewa memungkinkan aset tersebut menjadi milik penyewa atau dikembalikan kepada pemberi sewa pada akhir masa sewa istilah sewa pada pembahasan ini dulunya dikenal sebagai sewa guna usaha (leasing).

4. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi dalam PSAK 25 revisi 2009 didefinisikan sebagai prinsip dasar, konvensi peraturan dan praktik tertentu yang diterapkan entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi akan menentukan saat pengakuan, cara pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas elemen seperti aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban dalam laporan keuangan.

III. PEMBAHASAN

Akuntansi Pajak Penghasilan

1. Standar Akuntansi Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan dalam laporan keuangan diatur dalam PSAK 46 (revisi 2013) pajak penghasilan. Perubahan dalam revisi 2013 adalah penghapusan pengaturan mengenai pajak final, surat ketentuan pajak, pengaturan asset dan liabilitas pajak tangguhan atas asset yang tidak disusutkan yang diukur dengan menggunakan model revaluasi dan property investasi yang diukur dengan menggunakan nilai wajar.

2. Laba Sebelum Pajak dan Laba Sesudah Pajak

Dalam laporan keuangan, laba sebelum pajak disajikan sebelum beban pajak penghasilan. Laba sebelum pajak dikurangi beban pajak akan menghasilkan laba bersih atau laba setelah pajak. Laba akuntansi adalah laba atau rugi selama satu periode akuntansi sebelum dikurangi bukan pajak. Laba akuntansi biasanya dihitung dari laba operasi dikurangi dengan pendapatan dan beban lain-lain. Laba kena pajak atau laba fiskal (rugi pajak atau rugi fiskal) adalah laba (rugi) selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas pajak. Laba kena pajak dalam UU pajak penghasilan disebut sebagai penghasilan kena pajak (PKP). Penghasilan kena pajak merupakan penghasilan dikurangi dengan beban yang boleh dikurangkan menurut peraturan perpajakan. Pajak terutang dalam satu tahun fiskal merupakan hasil perkalian penghasilan kena pajak dengan tarif.

Imbalan Kerja

1. Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja yang akan diterima karyawan pada umumnya bersifat jangka pendek. Imbalan kerja jangka pendek adalah imbalan kerja yang diharapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat bekerja memberikan jasa. Imbalan kerja jenis ini tidak mencakup pesangon. Walaupun jatuh temponya juga dalam jangka pendek, namun pesangon terjadi karena pemutusan hubungan kerja, bukan karena jasa karyawan sehingga perlu diatur secara khusus. Imbalan kerja jangka pendek pada umumnya mencakup gaji, upah, iuran jaminan sosial, cuti ber imbalan, bagi laba dan bonus atau imbalan lainnya seperti rumah dan kendaraan dinas.

- Perlakuan akuntansi:

Perlakuan akuntansi khusus diterapkan pada cuti ber imbalan dan bagi laba dan bonus. Cuti ber imbalan adalah hak cuti yang memberikan kompensasi berupa imbalan. Cuti ber imbalan ada yang dapat di akumulasi kan, yaitu dapat digunakan

di masa depan kita cuti tahun ini tidak diambil seluruhnya.

2. Pesangon

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ketika terjadi pemutusan kontrak kerja (PKK), perusahaan wajib memberikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, serta uang penggantian hak kepada karyawan. Jumlah pesangon tersebut ditentukan berdasarkan lamanya masa kerja. Dengan demikian, pesangon merupakan imbalan yang wajib dibayarkan akibat terjadinya PKK, baik karena keputusan perusahaan (PHK) maupun keputusan karyawan yang menerima tawaran dari perusahaan. Pembayaran pesangon harus dilakukan dalam bentuk tunai, kecuali jika karyawan menyetujui bentuk pembayaran non-tunai.

Perlakuan Akuntansi

Perusahaan harus mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang paling awal antara:

- 1) Saat penawaran imbalan tersebut tidak dapat dibatalkan kembali.
- 2) Saat biaya yang terkait dengan restrukturisasi telah diakui sesuai PSAK 57 (Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi).

Penawaran pesangon yang bersifat sukarela dianggap tidak dapat ditarik kembali pada waktu paling cepat antara:

- 1) Ketika karyawan menerima tawaran tersebut.
- 2) Ketika terdapat pembatasan (misalnya ketentuan hukum, regulasi, kontrak, atau batasan lainnya) yang membuat perusahaan tidak lagi dapat menarik penawaran.

Apabila pesangon merupakan konsekuensi dari keputusan perusahaan untuk melakukan PHK, maka perusahaan dianggap tidak dapat menarik kembali tawaran tersebut setelah menginformasikannya kepada karyawan yang terdampak. Pengukuran pesangon dilakukan seperti imbalan kerja jangka pendek (tanpa diskonto), kecuali jika pesangon tersebut jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah periode pelaporan, maka pengukurannya mengikuti ketentuan imbalan kerja jangka panjang (dengan diskonto). Pesangon hanya berkaitan dengan jasa yang telah diberikan oleh karyawan, bukan sebagai kompensasi atas jasa yang akan diberikan di masa depan.

3. Imbalan pasca kerja

Istilah imbalan pasca kerja dikenal sehari-hari dengan lama pensiun. Namun imbalan pasca kerja tidak hanya mencakup pensiun, tapi semua imbalan yang akan diterima karyawan setelah masa kerja selesai, seperti asuransi dan tunjangan kesehatan pasca kerja. Jadi, imbalan pasca kerja adalah imbalan kerja yang disediakan perusahaan (selain pasangan) dan akan diberikan kepada pekerja setelah menyelesaikan masalah kerjanya. Pasangan bukan merupakan imbalan pasca kerja karena karyawan berhenti sebelum masa kerja normalnya.

Program imbalan pasca kerja terdiri atas dua jenis bergantung pada karakteristiknya:

- 1) Program iuran pasti, yaitu pemberi kerja membayar iuran sebesar jumlah yang sudah ditetapkan kepada dana pensiun. Pada program iuran pasti, pemberi kerja tidak memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika dana pensiun tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar seluruh imbalan kerja yang terkait dengan jasa yang diberikan oleh pekerja pada periode berjalan dan periode sebelumnya.
- 2) Program imbalan pasti, yaitu pemberi kerja wajib membayar sesuai dengan imbalan yang disepakati akan diterima bekerja saat selesai masak kerja nanti. Oleh karena itu, memberi kerja memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika dana pensiun tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar seluruh imbalan kerja sebesar nilai yang telah disepakati dengan kata lain pemberi kerja harus menanggung resiko atas kekurangan dana tersebut.

4. Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Imbalan kerja jangka panjang lainnya adalah imbalan kerja selain imbalan pasca kerja dan pesongan yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat bekerja memberikan jasanya. Imbalan ini dapat meliputi cuti beri balan jangka panjang dan imbalan cacat permanen serta bonus dan kompensasi lainnya yang dibayarkan lebih dari 12 bulan sejak akhir periode pelaporan. Berbeda dengan imbalan pasca kerja, imbalan kerja jangka panjang lainnya dibayarkan kepada pekerja selagi masih kerja. Contoh lain dari program ini adalah cuti sabatikal, penghargaan masa kerja, imbalan cacat permanen, dan lain-lain

Perlakuan akuntansi:

Untuk imbalan kerja jangka panjang lainnya perusahaan menghitung total nilai nitro dari jumlah berikut

1. Biaya jasa
2. Ya ya bungan itu atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto
3. Pengukuran kembali dari liabilitas (aset) imbalan pasti neto.

Akuntansi Sewa

Berdasarkan PSAK 30 revisi 11, sewa dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

1. Sewa operasi
2. Sewa pembiayaan

Perbedaan antara keduanya adalah pada sewa pembiayaan terjadi pengalihan secara substansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset, terlepas apakah hak milik pada akhirnya dapat dialihkan atau tidak. Sedangkan pada sewa operasi, pengalihan risiko dan manfaat tersebut tidak terjadi. Perlu diingat bahwa pengalihan risiko dan manfaat tidak harus dalam bentuk pengalihan kepemilikan, sehingga tidak adanya pengalihan kepemilikan belum tentu merupakan sewa operasi, jadi penekanannya bukan pada bentuk kontrak melainkan substansi transaksinya.

1. Akuntansi Sewa Untuk Lessee

Sewa pembiayaan

Pengakuan awal dan pengukuran

Pengakuan aset dan liabilitas

Pada saat pembiayaan mengakui aset dan liabilitas di awal masa sewa sebesar nilai terendah antara nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Nilai aset dan liabilitas tersebut diakui pada nilai yang sama kecuali jika terdapat uang muka atas sewa maka liabilitas diakui setelah dikurangi uang muka sebagai contoh jika nilai wajar aset adalah Rp. 100.000.000 dan nilai kini pembayaran sewa minimum adalah Rp. 97.000.000 maka jurnal yang dicatat oleh penyewa pada awal masa sewa adalah

Aset sewa pembiayaan 97.000.000

Liabilitas sewa pembiayaan. 97.000.000

Perhitungan nilai kini atas pembayaran sewa minimum dapat dilihat pada saat pengakuan awal, nilai liabilitas yang diakui sama dengan nilai aset kecuali telah terdapat pembayaran atas sebagian liabilitas. Jika nilai wajar aset adalah Rp.

97.000.000 dan penyewa sudah membayar uang muka sebesar Rp 10.000.000 maka jurnalnya adalah sebagai berikut:

- 1) Tingkat diskonto : nilai kini dari pembayaran sewa minimum dihitung menggunakan tingkat bunga implisit. Jika penyewa tidak mengetahui atau tidak praktis menghitung bunga implisit maka digunakan tingkat bunga inkremental. Tingkat bunga implisit mengacu kepada tingkat bunga yang digunakan oleh pemberi sewa dalam menghitung pembayaran sewa sementara tingkat bunga incremental adalah tingkat bunga yang dikenakan kepada penyewa atas sewa yang sejenis atau seandainya aset dibeli dengan sumber pendanaan lain.
- 2) Nilai residu : Aset sewaan biasanya dimiliki nilai residu. Nilai residu tersebut ada yang dijamin dan tidak dijamin. Jika nilai residu dijamin maka nilai tersebut termasuk dalam pembayaran sewa minimum sehingga nilai aset yang diakui dapat lebih besar dibanding yang tidak dijamin.
- 3) Biaya langsung awal: biaya langsung awal adalah biaya-biaya incremental yang dapat diatribusikan secara langsung dengan negosiasi dan pengaturan sewa. Biaya langsung awal yang dikeluarkan penyewa dalam sewa pembiayaan ditambahkan ke dalam jumlah yang diakui sebagai aset.
- 4) Pengukuran setelah pengakuan awal: pemisahan antara beban keuangan dan pelunasan pokok, setelah mengikuti aset dan liabilitas selanjutnya penyewa membayar sewa minimum secara periodik kepada pemberi sewa. Jumlah pembayaran sewa tersebut ditentukan oleh pemberi sewa setelah memperhitungkan imbal hasil bagi pemberi sewa. Oleh karena itu penyewa harus memisahkan bagian beban bunga dan pelulasan pokok atas pembayaran sewa minimum pada setiap periode. Jika terdapat pembayaran lain berupa rental kontinen, maka dibebankan pada periode terjadinya.
- 5) Penyusutan: dengan diakunya aset sewaan oleh penyewa maka pemberi sewa juga akan menghentikan pengakuan atas aset tersebut. Selanjutnya penyewa akan menyusutkan aset tersebut seperti halnya penyusutan pada aset tetap yang diatur dalam PSAK 16 revisi 11 periode penyusutan tergantung dari kriteria sewa pembiayaan mana yang terpenuhi pada perjanjian sewa. Jika aset tersebut beralih atau besar kemungkinan beralih kepada penyewa di akhir masa sewa, maka disusutkan sepanjang masa sewa atau umur manfaat mana yang lebih pendek. Apabila aset tidak beralih atau kecil kemungkinan beralih ke penyewa di akhir

masa sewa, maka disusutkan sepanjang masa sewa.

2. Akuntansi Sewa Bagi Lessor

Pengakuan awal dan pengukuran

Pengakuan piutang

Dalam sewa pembiayaan pada awal masa sewa lessor atau pemberi sewa mengakui piutang sewa sebesar nilai investasi bersih, yaitu investasi kotor yang didiskontokan dengan tingkat bunga implisit. Investasi kotor adalah pembayaran sewa minimum yang akan diterima lessor berdasarkan sewa pembiayaan ditambah nilai residu (jika ada). Jadi, nilai piutang yang diakui lessor pada awal masa sewa adalah sebesar nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum yang akan diterima ditambah nilai residu. Selain mengakui piutang sewa penyewa juga menghentikan pengakuan aset sewaan karena semua risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset telah dialihkan kepada penyewa. Nilai piutang yang diakui biasanya sama dengan nilai aset yang dihentikan pengakuannya kecuali jika terdapat uang muka atas sewa, maka piutang yang diakui setelah dikurangi uang muka.

Maka jurnal yang dicatat oleh lessor adalah sebagai berikut:

- 1) Tingkat diskonto : nilai kini investasi kotor dihitung menggunakan tingkat bunga implisit. Pembayaran sewa juga dihitung dan ditentukan oleh lessor menggunakan tingkat bunga implisit, maka tidak ada alasan bagi lessor untuk menghitung nilai kini investasi kotor menggunakan tingkat bunga lain.
- 2) Nilai residu: jika aset yang disewakan memiliki nilai residu maka diperhitungkan dalam nilai investasi kotor terlepas apakah nilai residu dijamin atau tidak. Perlakuan ini berbeda dengan lessee yang hanya memperhitungkan nilai residu yang dijamin dalam pembayaran sewa minimum.
- 3) Biaya langsung awal: biaya langsung awal yang dikeluarkan lessor dalam sewa pembiayaan ditambah ke dalam nilai investasi bersih. Hal ini dapat membutuhkan penyesuaian pada tingkat bunga implisit menjadi lebih rendah sehingga pendapatan bunga yang diakui lessor menjadi lebih rendah.
- 4) Pengukuran setelah pengakuan awal, pemisahan antara pendapatan sewa dan pelunasan pokok: pembayaran sewa yang dihitung oleh lessor setelah memperhitungkan penghasilan pembiayaan bagi lessor. Oleh karena itu, lessor harus memisahkan antara bagian pendapatan sewa dan pelunasan pokok atas pembayaran sewa minimum pada setiap periode. Pengakuan pendapatan sewa

didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengambilan periodik yang konstan atas investasi bersih lessor dalam sewa pembiayaan.

Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi, dan Kesalahan

1. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Untuk memenuhi kebutuhan daya banding laporan keuangan kebijakan akuntansi diterapkan secara konsisten. Perubahan kebijakan akuntansi dapat dilakukan entitas dengan memenuhi ketentuan dalam standar PSAK 25 revisi 2009 menjelaskan entitas mengubah suatu kebijakan akuntansi hanya jika perubahan tersebut:

1. Disyaratkan oleh suatu PSAK
2. Menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang andal dan lebih relevan tentang dampak transaksi, peristiwa atau kondisi lainnya terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan atau arus kas entitas.

Perubahan kebijakan akuntansi terjadi jika entitas mengubah pilihan kebijakan akuntansi untuk suatu transaksi atau peristiwa yang sama. Jika entitas menerapkan kebijakan akuntansi baru untuk peristiwa dan transaksi yang baru dan berbeda dari sebelumnya maka hal itu tidak dianggap sebagai perubahan kebijakan akuntansi. Perubahan kebijakan akuntansi dapat terjadi karena keharusan kebijakan standar mengharuskan entitas menerapkan metode baru. Misalnya PSAK 24 revisi 2013 imbalan kerja mengharuskan entitas menggunakan pendekatan penghasilan komprehensif lain dalam menentukan keuntungan atau kerugian aktuaria. Jika entitas selama ini menggunakan pendekatan koridor maka perubahan kebijakan akuntansi tersebut merupakan perubahan yang harus dilaksanakan.

2. Perubahan Estimasi

Unsur dalam laporan keuangan tidak semuanya diukur secara langsung namun pengukurannya dengan diestimasi. Penggunaan estimasi yang rasional adalah bagian dasar dalam penyiapan laporan keuangan. Untuk melakukan estimasi entitas menggunakan informasi yang tersedia dan andal. Beberapa contoh estimasi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan:

1. Piutang tak tertagih
2. Masa manfaat metode depresiasi dan nilai sisa pada aset yang didepresiasi atau diamortisasi

3. Liabilitas garansi
4. Persediaan yang rusak
5. Masa manfaat beban yang ditangguhkan
6. Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Estimasi perlu direvisi jika terjadi perubahan keadaan yang menjadi dasar estimasi atau munculnya informasi baru atau karena tambahan pengalaman perubahan estimasi akuntansi dihasilkan dari informasi baru atau perkembangan baru dan oleh karena itu, bukan dari koreksi kesalahan. Perubahan estimasi akuntansi adalah penyesuaian jumlah tercatat aset atau liabilitas, atau jumlah pemakaian periodik aset yang berasal dari penilaian status kini dan ekspektasi manfaat masa depan dan kewajiban yang terkait dengan aset dan liabilitas.

3. Kesalahan

Dalam penyusunan laporan keuangan entitas mungkin saja melakukan kesalahan. Laporan keuangan menjadi tidak sesuai dengan sak jika mengandung kesalahan material atau tidak material yang disengaja. Jika ditemukan kesalahan maka kesalahan tersebut harus dikoreksi. Jika laporan keuangan periode tersebut belum diselesaikan maka koreksi dengan mudah dapat dilakukan pada pos yang ditemukan kesalahannya. Namun jika kesalahan tersebut ditemukan pada periode berikutnya maka pos tersebut tetap harus dikoreksi dan dampaknya diterapkan secara retrospektif.

Menurut PSAK 25 revisi 2009 kesalahan periode lalu adalah kelalaian mencantumkan dan kesalahan mencatat dalam laporan keuangan entitas untuk satu atau lebih periode lalu yang timbul dari kegagalan atau kesalahan untuk menggunakan informasi andal yang :

1. Tersedia ketika penyelesaian laporan keuangan untuk periode tersebut
2. Secara rasional diharapkan dapat diperoleh dan dipergunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kesalahan tersebut dapat berupa dampak kesalahan perhitungan matematis kesalahan penerapan kebijakan akuntansi atau kesalahan interpretasi fakta dan kecurangan.

Laporan Arus Kas

Secara umum laporan arus kas terdiri dari tiga bagian yang merupakan karakteristik transaksi kas perusahaan yaitu sebagai berikut:

- Aktivitas operasi merupakan transaksi-transaksi kegiatan operasional yang dilaporkan dalam laporan laba rugi. Karena transaksi operasional ini sih pakai jangka pendek akun-akun utama dalam aset lancar non kas dan liabilitas lancar juga terkait dengan arus kas aktivitas operasi.
- Aktivitas investasi merupakan transaksi-transaksi yang terkait dengan perubahan aset non lancar termasuk investasi dan aset-aset tak berwujud.
- Aktivitas pendanaan merupakan transaksi-transaksi yang terkait dengan liabilitas jangka panjang dan ekuitas perubahan sebagai sumber pendanaan utama perusahaan.

1. Penyusunan Laporan Arus Kas

Untuk menyusun arus kas dari aktivitas operasi pada dua metode yang bisa dipilih oleh entitas yaitu metode langsung dan tidak langsung. Untuk aktivitas investasi dan pendanaan hanya ada satu metode yang digunakan yaitu metode langsung, sebelum memulai untuk menyusun laporan arus kas tiga jenis laporan keuangan berikut harus tersedia sebagai sumber informasi utama yaitu sebagai berikut.

1. Laporan posisi keuangan komparatif yang memuat informasi aset liabilitas dan ekuitas periode kini dan periode sebelumnya .
2. Laporan laba rugi periode berjalan
3. Data mengenai transaksi tertentu seperti transaksi pertukaran aset, pembayaran dividen non tunai dan pembelian investasi melalui hutang.

2. Metode Laporan Arus Kas

Metode Langsung:

Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menggunakan metode langsung adalah menentukan besarnya penerimaan kas dan pengeluaran kas dari aktivitas operasional. Laporan yang digunakan sebagai sumber penyusunan metode tidak langsung juga masih digunakan dengan sedikit modifikasi.

Metode Tidak Langsung

Untuk penyusunan arus kas aktivitas operasi dengan menggunakan metode tidak langsung dapat mengikuti urutan berikut

1. Menentukan keuntungan dan kerugian dari penjualan investasi atau aset non lancar lainnya.

2. Menentukan beban-beban non tunai seperti depresiasi dan amortisasi.
3. Menentukan perubahan saldo akun aset lancar dan liabilitas lancar.

IV. KESIMPULAN

Setiap topik mulai dari akuntansi pajak penghasilan, imbalan kerja, akuntansi sewa, kebijakan akuntansi, perubahan estimasi, kesalahan, hingga laporan arus kas memiliki aturan yang harus dipahami dan diterapkan secara konsisten oleh entitas.

Akuntansi pajak penghasilan membantu perusahaan menilai konsekuensi fiskal dari aktivitas keuangannya. Imbalan kerja mengatur berbagai bentuk kompensasi karyawan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk pesangon dan pensiun, yang semuanya harus diakui dan diukur secara tepat. Akuntansi sewa menekankan pentingnya menentukan substansi transaksi untuk membedakan antara sewa operasi dan sewa pembiayaan. Kebijakan akuntansi serta perubahan estimasi harus diterapkan secara konsisten untuk menjaga keandalan penyajian laporan keuangan, sementara kesalahan yang ditemukan wajib diperbaiki secara retrospektif.

Laporan arus kas menjadi pelengkap penting dalam memberikan informasi mengenai sumber dan penggunaan kas perusahaan melalui aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Dengan menerapkan standar-standar tersebut secara benar, entitas dapat menyediakan laporan keuangan yang tidak hanya memenuhi ketentuan regulasi, tetapi juga bermanfaat bagi pengambilan keputusan para pemangku kepentingan.

V. DAFTAR PUSTAKA

Martani, D., Siregar, S. V., Wardhani, R., Farahmita, A., Tanujaya, E., & Hidayat, T. (2019). *AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH BERBASIS PSAK*. Salemba Empat.

